

BAB V

PEMBAHASAN

V. 1. Pola Budaya Politik dalam Perilaku Politik Masyarakat Sedulur Sikep

Pada penelitian ini, unruk mengetahui pola budaya politik dan perilaku politik pada masyarakat sedulur sikep. Sebagai landasan dalam mengkaji pola budaya politik, makan menurut Almond dan Verb, menjelaskan budaya politik yang berupa bentuk sikap orientasi yang khusus yang dimiliki oleh masyarakat dan tentunya memiliki keterkaitan pada sistem politik. Adapun, masyarakat yang mengedepankan persoalan negara dalam berkehidupan sehari-hari, tentu ini merupakan sebuah orientasi nilai dan peran dalam sistem politik. Kemudian dalam mengetahui pola budaya politik, maka dibutuhkan sebuah pedoman.

Pertama, aspek politik dari pengetahuan individu, adat istiadat dan mitos. Dalam budaya politik terdapat sebuah pemahaman secara rasional yang digunakan dalam menerima norma-norma lain. *Kedua*, Selain itu, dalam budaya politik terdapat beberapa sistem yang harus ditekankan dalam persoalan materi seperti, demokrasi, sosialisme, maupun nasionalisme dan memiliki kaitannya dengan ciri budaya politik, bentuk, dan peran yang disederhanakan seperti militan, terbuka atau tertutup. *Ketiga*, pada hakikatnya ciri budaya politik merupakan salah satu masalah yang terletak pada prinsip dasar dari pandangan hidup yang memiliki keterkaitan dengan suatu permasalahan tujuan. *Keempat*, pemahaman budaya politik mencangkup pada dua hal sikap dan norma, sikap yang artikan sebagai bentuk perbuatan yang didasarkan atas pendirian dilihat secara sikap tertutup atau terbuka

dan dapat dilihat dari tingkat ketangguhan seseorang terhadap orang lain.

Data penelitian yang dimiliki dapat menjelaskan kepada aspek-aspek dalam budaya politik diatas, dengan pola budaya politik pada masyarakat samin sedulur sikep di dusun Klopoduwur yang didasarkan pada pola budaya politik menurut Almond dan Verb. Selain itu, pada pengetahuan individu mengenai hal-hal dasar dalam sistem politik, seperti yang dilakukan pada informan penelitian yang merupakan salah satu masyarakat samin di lokasi penelitian. Pendapat-pendapat yang disampaikan informan mengenai dasar negara. Dapat dikatakan bahwa pengetahuan mengenai dasar negara sangat terbatas. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan yang disampaikan oleh Bapak Nyari selaku ketua RT 01 Desa Klopoduwur Kabupaten Blora yang dimana beliau menyatakan sebagai berikut :

“...Kula ngertine proses pendidikan bernegara ian berbangsa namung pendidikan formal ian ingkang di punangge setengahipun lebet gesang dene pendidikan informal kados keluwargi ian masyarakat ingkang sae sanget woten angge ing gesang”¹

“.....aku mengartikan proses pendidikan bernegara dan berbangsa hanya digunakan setengahnya saja dalam menjalankan berkehidupan. Sedangkan pendidikan informal yang berada dalam lingkungan keluarga dan masyarakat sangat baik digunakan”

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui, informan mengenai

¹ Hasil wawancara dengan Bapak Nyari selaku ketua RT 01 Desa Klopoduwur Kabupaten Blora

bernegara melalui pendidikan secara formal maupun informal. Namun bila merujuk pada pendapat Mbah Lasiyo melalui pendidikan secara formal maupun informal.

Namun bila merujuk pada pendapat Mbah Lasiyo, ia bisa menggambarkan bernegara yang dikaitkan dengan budaya samanisme sebagai berikut :

“....Samin sikep artosipun sami-samin saherek, laki dan perempuan mboten mbentenaken sae lan awon lampahan saben masyarakat. Kados puniku ugi kalih bahasa, suku, dan agama. Menawi sadayaning tiyang dipynanggeo sadherek, kados lampahan sampun memfitnah ian dora setunggal kalih sanesipun”²

“....Samin sikep artinya sama-sama sedulur (keluarga), laki-laki dan perempuan tidak membedakan baik atau buruk perilaku setiap masyarakat. Begitu juga dengan bahasa, suku dan agama, bahwa semua orang dianggap saudara, seperti perbuatan jangan memfitnah dan berbohong satu dengan yang lainnya”

Pengetahuan kedua informan, cukup menjawab mengenai bernegara, hal ini karena informan merupakan salah satu keturunan asli dari Surosentiko, ia sering kali diminta tanggapan mengenai perkembangan masyarakat samin. Jika melihat wawancara dengan informan, ketika ditanya mengenai bernegara. Maka, pengetahuan informan akan memperlihatkan adanya percampuran antara pengetahuan adat istiadat samin dengan ideologi atau sistem politik. Tentu jika kita

² Hasil wawancara dengan Mbah Lasiyo selaku sesepuh adat Sedulur Sikep Desa Klopoduwur Kabupaten Blora

lihat sebagian besar ajaran lama, sudah tertinggal termakan perkembangan zaman. Hal ini yang seharusnya bisa kita lebur secara bersama-sama mengenai ajaran lama yang masih memiliki eksistensi terhadap perkembangan zaman saat ini.

Budaya politik yang tertera dalam masyarakat samin merupakan bagian dari sistem nilai dan kapercayaan yang dianut oleh masyarakat samin terutama di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora. Secara sederhana, budaya politik merupakan kesadaran terhadap suatu nilai sikap, perilaku, dan norma-norma dalam perilaku masyarakat yang diperuntukan untuk menghadapi proses politik yang akan datang maupun sedang berlangsung.³

Bahwa masyarakat samin saat ini sudah mengikuti perkembangan zaman yang sangat signifikan. Bentuk perubahan yang paling mendasar adalah prihal pendidikan, pendidikan keluarga dan masyarakat samin sekitar tahun 1990-an menganggap pendidikan hal tidak penting, terutama pada keluarga samin yang anak-anak mereka hanya diajarkan pendidikan ajaran samin saja. Sementara itu, perubahan yang terjadi tidak begitu cepat, saat ini pun masih terdapat masyarakat samin yang menutup diri dari lingkungan luar. Tentu mempertahankan budaya ditengah-tengah arus perkembangan global saat ini tidak mudah, realitanya adalah masyarakat samin sejak era Presiden Gus Dur mulai menerima berbagai bentuk fasilitas dari negara, misalnya saja masyarakat samin anak-anaknya sudah disekolahkan, menerima bantuan pemerintah, dan mendapatkan pelayanan.

³ Syahrul Kiron. Menerapkan Nilai Kearifan Lokal Budaya Samin dalam Pemerintahan di Indonesia. Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam, Vol. 9 Issue 1, July 2021

Hal ini dapat menggambarkan, bahwa pemerintah masih memiliki kepedulian terhadap kelestarian budaya masyarakat samin ini. Sistem pola pikir tradisional merupakan ciri khas dari masyarakat samin dilihat dari kekayaan batin, kesederhanaan, dan melestarikan kearifan lokal. Oleh sebab itu, nilai-nilai inilah yang bisa tanamkan pada kehidupan sekarang ini dan menjadi pedoman bagi masyarakatnya.

Pada dasarnya, di dalam masyarakat Jawa, memiliki aliran satu dengan proses politik maupun sosial. Tentunya, ini akan menjadi satu kesatuan pada pengelompokan sosial, yang menumbuhkan perasaan kebersamaan yang sama pada setiap individu. Dalam mempelajari politik, seperti yang dilakukan oleh perilaku memilih di masyarakat desa Jawa, hal ini sangat signifikan karena membuka kerangka sosio-kultural yang terdapat pada masyarakat Jawa.⁴

Pada masyarakat samin *sedulur sikep* Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora, memiliki kecondongan pada arah tipe budaya politik parokial (*parochial political culture*). Pada budaya politik ini masyarakat samin di luar desa klopoduwur masih mempertahankan keaslian adat istiadat mereka. Pada dasarnya masyarakat samin *sedulur sikep* dalam hal pendidikan sudah terbilang maju dari segi pendidikan yang mereka peroleh sejatinya sudah ada, tetapi dalam implementasinya mereka belum memahami berpartisipasi dalam konteks bernegara. Tentu, hal ini yang menjadikan sebuah permasalahan baru, konteks bernegara dalam artian berpartisipasi dalam Pemilu Bupati Blora.

⁴ Asep Nurjaman. Partai Dan Pemilu (Perilaku Politik di Aras Lokal Pasca Orde Baru). Malang : UMM Press, 2019.

Adapun dalam budaya politik terdapat sebuah perbedaan yang berkembang di lingkup masyarakat yang dipengaruhi beberapa aspek⁵, sebagai berikut:

Pertama, faktor pendidikan yang merupakan salah satu bentuk kunci budaya politik dalam melakukan perubahan pada kehidupan masyarakat. *Kedua*, faktor ekonomi yang disadarkan dari aspek sejahtera, semakin baik perekonomian seseorang maka semakin baik pula tingkat partisipasi masyarakat. *Ketiga*, faktor politik yang merupakan bagian dari sistem politik dalam menentukan kehidupan seseorang menjadi lebih baik. *Keempat*, komunikasi yang dilakukan bersifat independen yang memiliki karakteristik sebagai kontrol sosial dan mandiri.

Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan sebuah penguatan baru dalam menggait masyarakat samin ini untuk menanamkan nilai-nilai bernegara dalam kehidupannya. Dalam tipe budaya politik parokial ini, kalau kita sandingkan dengan proses pemilukada, tentu daerah seperti ini yang menjadi sasaran dalam melakukan kegiatan kampanye. Terdapat pada lingkungan yang dipimpin oleh seorang kepala suku, biasanya memiliki pengaruh politik yang sangat signifikan baik dalam proses penentuan sikap masyarakat keseluruhan.

V. 2 Partisipasi Politik Masyarakat Sedulur Sikep Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora dalam Kontestasi Pilkada 2020

Partisipasi politik merupakan sebuah hubungan antara kesadaran dalam berpolitik dan sistem kepercayaan. Partisipasi politik memiliki keterkaitan dengan demokrasi terhadap aspek legitimasi yang satu pandangan dengan pemerintah. Selain itu, partisipasi politik juga digunakan masyarakat sebagai kontrol terhadap

⁵ Khoiril Saleh dan Acmat Munif. Membangun Karakter Budaya Politik Dalam Berdemokrasi. ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015

jalannya suatu pemerintahan, tentu kontrol ini perlu dilakukan oleh masyarakat guna untuk menjaga pemerintahan berjalan sesuai dengan amabat konstitusi maupun UUD 1945. Dalam Pemilu, partisipasi politik memiliki pengaruh terhadap pasangan calon yang terpilih, dan legitimasi (*seberapa jauh masyarakat dapat menerima kewenangan, keputusan kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin*) memiliki peran penting dalam keputusan masyarakat, tentu bisa dilihat bahwa setiap orang memiliki keputusan dan kepentingan masing-masing dalam menentukan pilihan dalam pemilu.⁶

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan pada masyarakat Samin di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora, masyarakat samin memiliki pandangan mengenai partisipasi politik. Masyarakat samin Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora, hal ini sejalan dengan melihat pelaksanaan Pilkada pada pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Blora.

Pemilu kepala daerah merupakan suatu amanah undang-undang yang timbul dari gerakan reformasi tahun 1998. Perlunya partisipasi masyarakat yang ikut secara langsung dalam proses demokrasi. Pada dasarnya, pemilihan kepala daerah merupakan momentum dalam konteks demokrasi atau pergantian lima tahunan yang diperuntukan bagi kehidupan bernegara. Momentum pilkada ini, merupakan mengambil bagian dalam proses ini, agar apa yang di cita-citakan untuk daerah yang maju dan pemimpin yang humanis dapat tercipta dengan baik.

⁶ Ni Ketut Artini. Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar. JURNAL ILMIAH DINAMIKA SOSIAL. VOLUME 4 NOMOR 2 2020

Partai politik, merupakan suatu organisasi yang diciptakan untuk mendukung dari berjalannya sistem demokrasi, pada partai politik terdapat anggota-anggota aspek perubahan dalam membangun suatu daerah, tentu masyarakat bisa anggota atau *kader partai* yang mempunyai kesamaan nilai-nilai, orientasi dan cita-cita bersama. Selain itu Partai politik merupakan infrastruktur dari sistem demokrasi yang digunakan dalam menggapai suatu tujuan yang diraih, diperlukan suatu usaha dengan cara mengambil bagian dalam proses memperebutkan kekuasaan melalui jalan pemilihan umum.⁷ Tentu ini bukan hal yang mudah diperlukan menyatukan visi-misi oleh para kader partai politik, guna untuk memenangkan pemilihan umum pada tingkatan kabupaten, kota atau nasional.

Partai politik yang menguasai pada saat kontestasi pemilihan kepala daerah pada tahun 2020 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sebagai partai politik PDI-P sudah mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat. Kemudian ada beberapa partai politik yang berkembang saat ini di Desa Klopoduwur pada saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020, sebagai berikut :

- 
1. Partai Kebangkitan Bangsa
 2. Partai Golongan Karya
 3. PDI- Perjuangan
 4. Partai Gerakan Indonesia Raya
 5. Partai Persatuan Pembangunan
 6. Partai Demokrat
 7. Partai Hati Nurani Rakyat
 8. Partai Keadilan Sejahtera
 9. Partai Amanat Nasional
 10. Partai Nasdem

⁷ Labolo, Teguh. Partisipasi Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. Jakarta: 2015

Bahwa dalam data pemilih pada Pemilihan kepala daerah tahun 2020 dapat dideskripsikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih masyarakat dalam pilkada sebesar 5.447. Diatas adalah jumlah partai politik yang memiliki kepengurusan partai di tingkat desa terdapat 10 partai politik.

Pak Parjo selaku warga Samin Desa Klopoduwur menyatakan pendapatnya mengenai partai politik sebagai berikut :

“.....Partai politik mboten ngertos, pendidikan pungkasan kula mawon namun sekolah dhasar. Inggang dipunwical sami bapak ibu kula inggih punika mboten betah tumut politik”⁸

“.....Partai politik saya tidak mengerti, pendidikan terakhir saya hanya sekolah dasar. Yang diajarkan sama bapak ibu adalah tidak usah ikut-ikutan politik”

Hal ini juga selaras yang disampaikan oleh Bapak Nyari selaku ketua RT 01 Desa Klopoduwur, yang dimana beliau menyatakan pendapatnya mengenai partai politik sebagai berikut :

“.....Menawi nakekaken parte politik kula radi bingung, manawi woten pemilihan wonten ngiriki mas, kita numuti mawon arahan saking dhusun”⁹

“...Kalau menanyakan mengenai partai politik saya agak bingung,

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Prarjo selaku warga samin Desa Klopoduwur Kabupaten Blora

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Nyari selaku ketua RT 01 Desa Klopoduwur Kabupaten Blora.

kalau ada pemilihan disini mas, kita mengikuti saja arahan dari desa”

Berdasarkan wawancara diatas, maka dapat disimpulkan sebagian besar masyarakat sedulur sikep ini mengetahui secara gambaran besar arti dari partai politik. Tetapi mereka tidak mengetahui hal-hal apa saja yang tertera dalam partai politik. Mereka dalam menjalankan menjalankan kehidupan politiknya hanya berpegangan dengan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh bapak ibu secara turun-menurun, mereka mengedepankan pendidikan yang diajarkan dalam keluarga, tentu pendidikan inilah menjadi pedoman mereka dari dulu hingga saat ini dan mereka menilai dan meyakini bahwa ajaran pendidikan yang diberikan oleh orang tua mereka, dapat memberikan nilai-nilai terbaik bagi anak-anaknya mengenai sikap dan nilai norma-norma pada kehidupan sehari-hari.

Partisipasi politik dapat dilihat dari tingkatan pendidikan seseorang, apabila orang tersebut memiliki pendidikan yang rendah, tentu menjadikan masalah baru pada kehidupannya, apalagi seiring berkembangnya sebuah sistem politik kedepannya, banyak cara-cara yang dilakukan oleh seorang politisi untuk merebut hati masyarakat. Berbanding terbalik, dengan masyarakat yang memiliki tingkatan pendidikan lebih tinggi, tentu mereka akan melihat secara garis besar kontribusi apa yang diberikan oleh salah satu paslon dalam membangun daerah atau desa tersebut.

Selain itu, partisipasi politik tumbuh dan berkembang melalui kesadaran politik dan kepercayaan pemerintah. Apabila seseorang tersebut memiliki tiga aspek partisipasi politik tersebut, maka tingkat partisipasi pada suatu daerah akan meningkat.

Pada dasarnya, sertiap warga negara berhak untuk menyampaikan aspirasinya. Dalam hal ini, masyarakat samin diharapkan turut aktif dan berkontribusi dalam pelaksanaan sistem demokrasi, melalui pemilihan umum. Sesuai dengan UUD 1945 pada Pasal 27 ayat 1 yang menjelaskan “*segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya*”.¹⁰ Masyarakat samin mempunyai kedudukan dan hak-hak politik untuk menentukan pemimpin terbaik dalam pemilu, baik dalam tingkat daerah maupun nasional. Pada penjelasan sebelumnya, bahwa masyarakat samin mulai mengalami pergeseran perkembangan dalam berintraksi dengan lingkungan sekitar. Pergeseran itu terjadi pada masyarakat samin dahulu yang sulit dalam berinteraksi dan sulit terbuka dengan masyarakat sekitar. Perkembangan mereka cukup signifikan yang dapat dilihat pada pelaksanaan kebijakan pemerintah seperti kontribusi dalam membangun daerah, berpartisipasi dalam pemilu atau Pilkada. Sejatinya, sistem politik tingkat lokal merupakan suatu kehidupan yang dihubungkan antara para pelaku politik dan kelompok politik yang berlaku hanya di wilayah setempat saja, sedangkan sistem politik lokal, merupakan hubungan antara pelaku dan kelompok politik yang memiliki sifat kompleks, namun dalam menjalankan hubungan kedua belah pihak hanya dilakukan pada wilayah terbatas.¹¹

Pada dasarnya kesadaran politik, masyarakat samin sudah terlihat aktif dan berkontribusi dalam pemilukada, hal ini terlihat dengan antusias masyarakat yang

¹⁰ Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

¹¹ Diana Fawzia. Demokrasi Indonesia Di Antara Dua Sistem Politik. Seminar Nasional P4M UNAS, 3 April 2018

berdatangan ke TPS (*tempat pengumutan suara*) untuk menyalurkan hak-hak politiknya dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Blora.

Namun, masyarakat samin dalam keterbukaan mengenai politik mereka tetap memberikan batasan dalam berpolitik pada lingkungannya. Misalnya, menjelang pemilihan kepala daerah, timbul praktik-praktik kampanye yang berada pada lingkungan mereka, tetapi mereka berpegang pada pedoman yang diartikan sebagai menolak untuk bergabung pada salah satu tim kampanye atau paslon yang sedang bertarung gagasan. Berdasarkan hal tersebut, masyarakat samin menolak adanya kampanye *money politik*, tentu hal ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran yang selama ini masyarakat samin pegang.

Hal ini yang diperkuat dengan hasil wawancara dengan yang disampaikan oleh Bapak parjo⁵⁴ sebagai berikut :

“....Mboten, poltik arta utami tim sukses kados puniki mboten woten mas woten ngriki. Menawi nggih woten masyarakat mesthi ajeng menolakupun, amargi bertentangan kalih nilai sadherek sikip ingkang sampun dipunwucul wiwit alit.

“....Engga, politik uang atau tim sukses seperti ini tidak ada mas disini. Kalau pun ada masyarakat pasti akan menolaknya, karena bertentangan dengan nilai sedulur sikep yang sudah diajarkan sejak kecil”¹²

¹² Hasil wawancara dengan Pak Parjo selaku masyarakat adat Sedulur Sikep Desa Klopoduwur Kabupaten Blora

Dalam konteks partisipasi politik, terdapat sebuah kebijakan musyawarah yang digunakan untuk menentukan pilihannya secara bersama-sama. Kebijakan ini yang terdapat pada masyarakat samin masih digunakan oleh sebagian samin yang berada di wilayah Blora. Selain itu, kebijakan musyawarah merupakan budaya dan hukum adat yang patut untuk dilestarikan dan dijalankan secara turun-temurun. Mekanisme dalam menjalankan kebijakan musyawarah ini adalah masyarakat samin dikumpulkan di sebuah pendopo pertemuan yang dipimpin oleh tokoh adat selaku pengambil keputusan. Keputusan yang dihasilkan secara musyawarah bersifat memikat, artinya masyarakat harus satu suara dalam hal pemilihan dan tidak dapat menentukan pilihannya secara individu, karena itu telah melanggar kesepakatan bersama pada forum musyawarah. Kemudian masyarakat yang sudah beranjak dewasa dapat menyalurkan aspirasi politik dalam menentukan pilihannya sesuai dengan keputusan bersama. Sedangkan dari hal mengenai kebijakan yang ada pada tingkat pedesaan, masyarakat samin sudah mulai menerima berbagai konsekuensinya dalam menerima kebijakan tersebut. Hal ini yang diutarakan oleh Bapak Mahmud Syukron selaku Perangkat Desa Klopoduwur,¹³ sebagai berikut:

“.....Tidak ada perbedaan khusus antara masyarakat samin dengan masyarakat umumnya, karena melihat masyarakat samin yang saat ini sudah menerima segala bentuk kebijakan baik yang dikeluarkan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, maupun desa.”

Selain itu, untuk kendala dalam melaksanakan kebijakan tersebut, sesuai dengan

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Mahmud Syukron selaku Perangkat Desa Klopoduwur

yang disampaikan oleh Bapak Mahmud Syukron selaku Perangkat Desa Klopoduwur adalah :

“.....Untuk kendala dalam pelaksanaan kebijakan sendiri tidak ada, tetapi pasti kalau ada kendala pada masyarakat samin, maka masyarakat samin akan mendatangi kantor desa untuk menyelesaikan sebuah permasalahan.

Kemudian melihat perkembangan zaman, telah merubah pandangan berpolitik kebijakan musyawarah yang dilakukan secara rutin menjelang pemilu, baik tingkat desa, kabupaten, provinsi, maupun nasional. Masyarakat mulai membiasakan diri dengan menerapkan sistem demokrasi dan memberikan kebebasan secara penuh kepada masyarakat untuk memilih pilihanya pada pemilukada. Oleh karena itu, masyarakat samin sudah tidak lagi terikat dengan keputusan musyawarah.¹⁴

Hal ini, merupakan salah satu perubahan kearah positif yang memberikan masyarakat tanggap pada persoalan politik yang sedang berlangsung dan membentuk kesadaran politik guna menumbuhkan sistem demokrasi yang berada pada lingkungan pedalaman.

Masyarakat samin sudah mengalami perubahan pada prihal berpartisipasi dalam pilkada, perubahan ini dapat dilihat sebagai berikut :

¹⁴ Muh Fathono. Literasi Politik Komunitas Samin di Bojonegoro dalam Pemilu. Jurnal Kajian Hukum Islam. Vol. 14 No. 2, Desember 2020

Tabel 5.1 Pemilihan Kepada Daerah Berdasarkan Musyawarah

No	Dahulu	Sekarang
1.	Ketua adat mewakili masyarakat dalam pemilihan kepala daerah.	Pemilihan kepala daerah diselenggarakan secara langsung.
2.	Melaksanakan musyawarah, sebagai rembug desa untuk mencari dan menentukan pilihan yang tepat.	Melaksanakan musyawarah, hanya sebatas mencari sosok yang tepat, namun tidak menetapkan.
3.	Hasil dari musyawarah bersifat memikat dan mutlak.	Masyarakat diberikan kebebasan dalam menentukan pilihannya, tidak lagi berpaku pada keputusan hasil musyawarah.

Penjelasan mengenai bentuk partisipasi politik masyarakat Samin dalam kegiatan Pemilihan kepala daerah, Mbah Lasiyo selaku sesepuh adat Sedulur Sikep mengungkapkan pendapatnya :

“...Kangge sesepuh samin mboten nemtukaken pilihanipun ing pilkada 2020 amargi sumerep punapa ingkang dipunwucal dening wucalan samin menawi kita mboten angsal kangge nyakiti manah tiyang sanes.

Nanging m4bah lasiyo piyambak nyukani kamardikan kalih sedulur samin kangge nemtukake pilihanipun ing pemilu”¹⁵

“.....Untuk sesepuh samin tidak menentukan pilihannya pada pilkada 2020, karena melihat dengan apa yang diajarkan oleh samin bahwa kita tidak boleh untuk menyakiti hati orang lain. Tetapi mbah lasiyo sendiri memberikan kebebasan kepada pengikut samin untuk menentukan pilihannya pada pemilu”

Hal ini diperkuat dengan pernyataan Bapak Mahmud Syukron selaku perangkat Desa Klopoduwur yang dimana beliau menyatakan sebagai berikut :

“.....Untuk masalah coblos-mencoblos pada Desa Klopoduwur dilakukan secara keseluruhan mas. Tetapi Cuma Mbah Lasiyo kurang tau ikut memilih atau tidak, karena beliau tokoh adat dan beliau lah yang mempersatukan adat disini. Untuk warga lainnya mengikuti informasi dari desa”¹⁶

Masyarakat samin merupakan masyarakat yang memiliki ciri yang berbeda dengan masyarakat lainnya. Perbedaan terletak pada pola pikir yang diajarkan secara turun menurun, hal ini berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa masyarakat samin sejatinya tidak berpartisipasi dalam kegiatan pemilu, mereka

¹⁵ Hasil wawancara dengan Mbah Lasiyo selaku sesepuh adat Sedulur Sikep Desa Klopoduwur Kabupaten Blora

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Mahmud Syukron selaku Perangkat Desa Klopoduwur

menganggap pemilu itu bagian dari tindakan negatif, tentu nilai inilah yang menjadi pegangan oleh sebagian masyarakat samin yang masih menolak untuk berpartisipasi dalam pemilu.

Tetapi indikator terhadap peningkatan partisipasi politik semakin meningkat, bahwa dalam pemilihan suara mengalami peningkatan yang digambarkan pada Pemilukada Kabupaten Blora tahun 2020, sebagian besar masyarakat samin menjalankan dan menyalurkan hak-hak politiknya dengan berdatangan ke TPS untuk melakukan hak pilihnya. Selain itu, tahun 2020 merupakan tahun yang terbilang sulit dalam melakukan kampanye, terutama seperti masyarakat samin yang berada di pedalaman hutan Blora, mereka sangat terobsepsi dengan stigma negatif pada setiap orang asing yang datang ke lingkungan mereka. Hal ini dikarenakan, pada aspek kesehatan yang rata-rata umur masyarakat samin di Desa Klopoduwur >50. Tentu ini bukan menjadi kendala bagi masing-masing tim sukses yang ingin melakukan kampanye pada desa tersebut.

Bahwa dapat dikatakan indikator tingkat partisipasi politik masyarakat samin termasuk kedalam kategori spectator karena dilihat dari peran aktif masyarakat samin yang berkontribusi dalam penyelenggaraan pemilu, tentu inilah yang membedakan masyarakat samin dahulu dengan sekarang. Tetapi, dalam pelaksanaan partisipasi politik masyarakat samin hanya mengikuti ketentuan yang disarankan oleh pemerintah daerah setempat, diluar itu masyarakat samin akan menolaknya dan memberikan batasan terhadap situasi perpolitikan. Dengan demikian, perubahan inilah yang menjadikan titik balik masyarakat samin dalam berperan aktif terhadap sistem demokrasi bangsa Indonesia.

Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Blora tahun 2020, dilaksanakan di sembilan tempat pengumuman suara (TPS) yang berlokasi di Desa Klopoduwur. Pada pemilihan tersebut diikuti oleh kepala keluarga sebanyak 1.730 dan terdapat kepala keluarga samin sebanyak 25 kk. Pilkada serentak ini, sukses dalam menciptakan situasi pemilihan yang interaktif. Masyarakat samin secara berkelompok dan individu, baik golongan tua dan muda memilih calon bupati dan wakil bupati sesuai dengan hati nuraninya. Hal ini juga selaras dengan yang disampaikan oleh Bapak Nyari selaku ketua RT 01 yang dimana beliau menyatakan, sebagai berikut :

“...Alasan tumut lebenting milih bupati amargi asring mriki ingkang keliatanipun langkung memperhatikaken masyarakat alit”¹⁷

“...Alasan dalam memilih bupati karena calon tersebut sering jalan-jalan kesini (desa klopoduwur) yang kelihatannya lebih memperhatikan sama masyarakat kecil”

Bahwa dalam kontestasi pemilukada, masyarakat sering kali disulitkan dengan berbagai pilihan kandidat. Tentu ini, bukan hal mudah dalam menentukan pilihnya. Apalagi yang dipilih saat pemilihan merupakan harapan daerah dalam lima tahun kedepan. Selain itu, terdapat faktor yang mempengaruhi sebuah keputusan memilih pada pilkada 2020¹⁸, diantaranya sebagai berikut :

1. Faktor Pengalaman Kerja Kandidat Kepala Daerah

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Bapak Nyari selaku masyarakat ada Sedulur Sikep dan ketua RT 01 Desa Klopoduwur

¹⁸ Sherly Alifah Citrayanti, Indrawato Yuhertiana. Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Memilih Pada Pemilih Muda Dalam Pilkada Tahun 2020. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja. Volume 47, No. 2, November 2021

Pengalaman kerja merupakan faktor penting dalam menentukan strategi menjalankan organisasi yang dipimpinnya. Hal tersebut merupakan faktor pendukung seorang pemimpin dalam melakukan pengambilan keputusan. Para pemilih akan melihat dan menjadikan pertimbangan pengalaman kerja pada kandidat yang sedang berkompetisi dalam pilkada, tentu pengalaman kerja ini sesuai dengan jabatan yang hendak ingin diraih. Sehingga pertimbangan-pertimbangan ini dipikirkan secara matang oleh pemilih yang nantinya diharapkan akan membawa kebaikan dan perubahan bersama.

2. Faktor Tingkat Pendidikan Kepala Daerah

Pendidikan merupakan aspek dasar dalam membentuk seseorang menjadi berkarakter dan berwibawa. Hal yang patut disoroti adalah, para kandidat yang sedang berkompetisi dalam pilkada akan menjual gelar pendidikan, karena gelar tersebut memiliki nilai lebih dalam mempolarisasi pemilih. Disamping itu, diperlukan modal lain dari aspek ekonomi, sosial, maupun politik. Masyarakat menilai bahwa seorang pemimpin yang memiliki pendidikan tinggi, akan memiliki pengetahuan dan wawasan yang mumpuni. Maka dari itu pendidikan merupakan termasuk salah satu faktor pendukung, masyarakat dalam menentukan pilihannya.

3. Faktor Latar Belakang Ekonomi dan Sosial

Latar belakang dari ekonomi dan sosial, merupakan aspek pendukung dalam berkompetisi pilkada atau menjadikan ekonomi

dan sosial cerminan dalam kehidupan calon pemimpin. Masyarakat akan menilai dan melihat kandidat berdasarkan kedekatannya terhadap masyarakat, misalnya mengunjungi daerah-daerah yang memiliki adat istiadat yang kental, dan memperhatikan masyarakat kecil. Selain itu, track record seorang pemimpin harus terlihat, diikuti dengan ideologi, faktor keturunan, dan dalam bentuk fisik (*paras*).

4. Faktor Budaya Politik

Budaya politik merupakan salah satu faktor yang meningkatkan antusias masyarakat dalam berpartisipasi pada pemilu. Hal ini, didukung dengan lingkungan yang dapat mempengaruhi keputusan masyarakat pada pilihannya. Budaya politik akan menciptakan suatu kondisi, dimana isu-isu yang sedang meningkat seperti Pilkada serentak ini akan membuat partisipasi masyarakat semakin terbuka. Tentunya keterbukaan ini, menggambarkan pemikiran mengenai pengetahuan, wawasan dan dampak bagi partisipan untuk melakukan pertimbangan-pertimbangan sebelum menentukan pilihannya pada Pilkada tahun 2020.

Pendidikan politik merupakan sebuah sistem sosialisasi yang mengajarkan kebangsaan dan sistem politik. Sosialisasi politik merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk membentuk sikap dan mengubah pola pikir dan komunikasi dalam masyarakat mengenai politik. Proses sosialisasi politik tentunya memberikan sebuah penyadaran politik terhadap seseorang, penyadaran tersebut diartikan sebagai seseorang yang terlibat aktif dalam proses partisipasi politik.

Atau diterjemahkan dalam teori strukturasi menurut Anthony Giddens, bahwa aktor politik memiliki kepengaruhannya dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan serta turut aktif dalam menentukan pimpinan pemerintahan khususnya dalam sistem demokrasi seperti pada tingkat daerah atau nasional¹⁹. Sedangkan dalam pendidikan politik bukan saja mempelajari tentang sikap dan perilaku, tetapi dengan berpendidikan politik sikap dan perilaku dapat dihubungkan dengan stabilitas sistem politik.²⁰

Masyarakat desa merupakan masyarakat yang memiliki karakteristik tersendiri dalam menjalankan kehidupannya, karakteristik tersebut di topang dengan nilai-nilai budaya yang mereka telah tanam sejak kecil, terdapat budaya komunikasi masyarakat samin yang dilakukan berjalan baik mereka saling memahami dalam berinteraksi sosial dengan sesama masyarakat samin lainnya.²¹ Selain itu, masyarakat desa saat ini, dapat dikatakan sebagai masyarakat modern, dimana yang terdapat pada Desa Klopoduwur, mayoritas masyarakatnya sudah memanfaatkan teknologi modern dalam menjalankan kehidupannya, seperti televisi, motor, traktor pembajak sawah. Hal ini sependapat dengan Edward M. Bruner, bahwa kebudayaan dengan mayoritas dapat menentukan bentuk hubungan antar kelompok di suatu wilayah, seperti di Kabupaten Blora kebudayaan yang dominan adalah kebudayaan Jawa selaku dengan kebudayaan mayoritas, maka para pendatang harus menyesuaikan diri dengan kebudayaan tersebut dan antar etnis yang bersifat terbuka.²² Tentu hal ini, sebagai masyarakat desa dinilai tidak

¹⁹ Kamaruddin Salim dan Efriza, Sosiologi Politik, (Jakarta: Intrans Publishing, 2019), hlm. 148

²⁰ Ni Ketut Restini. Pendidikan Politik Berbasis Desa Adat Bagi Kaum Perempuan. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Tahun 2014

²¹ Emilia Vinna. Pola Komunikasi Suku Samin di Kabupaten Blora terkait Ajaran yang Dianutnya. The Messenger Volume VII, Nomor 2, Edisi Juli 2015

²² Kamanto Sunarto, Pengantar Sosiologi. Jakarta: Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2018, hal. 143

Tentu hal ini, sebagai masyarakat desa dinilai tidak terpinggirkan dengan aspek-aspek modern tersebut. Kemudian, karena derasnya dalam menentukan pimpinan pemerintahan khususnya dalam sistem demokrasi seperti pada tingkat daerah atau nasional. Sedangkan dalam pendidikan politik bukan saja mempelajari tentang sikap dan perilaku, tetapi dengan berpendidikan politik sikap dan perilaku dapat dihubungkan dengan stabilitas sistem politik.

Sejarah panjang masyarakat samin dalam melihat pandangan politik, sangat-sangat memperhatikan, hal ini yang disebabkan karena masyarakat samin dahulunya sebagai masyarakat yang tertutup dari pengaruh dunia luar, segala upaya dan cara-cara dilakukan oleh pemerintah setempat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat samin pada sistem demokrasi, seperti pemilihan kepala daerah.

Hal ini, selaras dengan hasil wawancara bersama Bapak Mahmud Syukron selaku Perangkat Desa, yang dimana beliau menyatakan sebagai berikut :

“.....Itu biasanya mengenai sosialisasi politik dilakukan oleh jajaran dari KPU Provinsi dan Kabupaten, biasanya datang langsung ke pendopo. Nanti masyarakat samin diundang. Biasanya kegiatan ini rutin dilakukan menjelang Pemilu, sedangkan dari pemerintah desa tidak ada”²³

Bahwa pendidikan politik sangat penting dilakukan menjelang pemilu. Salah satu manfaat yang bisa diberikan adalah angka dari golongan putih bisa ditekan secara signifikan, dan kesadaran politik dapat meningkat. Hal ini yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah²⁴, mereka

²³ Hasil wawancara dengan Bapak Mahmud Syukron selaku Perangkat Desa Klopoduwur

²⁴ Arief Syaefudin, 2018. KPU Jateng datangi warga samin di Blora untuk cokolit data pemilihan. (News Detik.com)

melakukan sosialisasi di Desa Klopoduwur untuk memberikan pendidikan politik dan memastikan bahwa seluruh masyarakat samin melaksanakan hak pilihnya pada pemilu.

Salah satu permasalahan di desa tersebut bahwa, sebagian masyarakat (samin) memiliki kecenderungan kurang tertarik dan percaya pada sistem pemerintahan. Pendekatan-pendekatan dalam menyelesaikan permasalahan ini harus dilakukan dengan pendekatan kebatinan dan kekeluargaan. Cara-cara tersebut dapat terlaksana apabila ada semangat dan dorongan dari semua stakeholder. Tentu harapan besar datang, kepada masyarakat samin untuk bisa memberikan sumbangsih pada pembangunan daerah dan nasional, dengan mengutamakan nilai-nilai tradisional.

